

ISLAM NUSANTARA: ADVOKASI BUDAYA DALAM UPAYA KESELARASAN ANTARA KEISLAMAN DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA

Muhammad Eko Anang
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: anangek@gmail.com

Abstract

Nusantara Islam is a concept of Islam that was born as a form of counter to transnational Islamic movement and Islamic radicalism. Transnational Islamic movements such as the Muslim Brotherhood, Hizbut Tahrir and so on are considered to make friendly, tolerant and moderate forms of Islam in Indonesia radical Islam. In addition, Nusantara Islam is triggered due to concerns about local culture that is increasingly aggravated with the current of globalization. With the value of Islam which is mercy *li al-'a>lami>n* should the concept of Islam Nusantara can be accepted by the whole of Islam. But this concept is not independent of the pros and cons. By using the theory of advocacy, this article is expected to be able to answer the reasons for Nusantara Islam as a form of advocacy of culture, especially local culture in Indonesia.

Keywords: *Nusantara, culture and advocacy.*

Abstrak

Islam Nusantara merupakan suatu konsep keislaman yang lahir sebagai bentuk *counter* terhadap gerakan Islam transnasional dan juga radikalisme Islam. Gerakan Islam transnasional seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan sebagainya dianggap dapat menjadikan bentuk Islam di Indonesia yang ramah, toleran dan moderat menjadi Islam radikal. Selain itu Islam Nusantara dicetuskan dikarenakan adanya keprihatinan terhadap kebudayaan lokal yang semakin tergerus dengan arus globalisasi. Dengan nilai Islam yang bersifat *rahmat li al-'a>lami>n* seharusnya konsep Islam Nusantara dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Tetapi konsep ini tidak terlepas dari adanya pro dan kontra. Dengan menggunakan teori advokasi, tulisan ini diharapkan mampu menjawab alasan Islam Nusantara sebagai bentuk advokasi terhadap kebudayaan, khususnya kebudayaan lokal di Indonesia.

Kata kunci: *Islam, budaya, advokasi*

Pendahuluan

Islam merupakan agama *rahmat li al-'alami>n* yang berlaku secara universal. Sehingga konsep ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada suatu kelompok, suku ataupun bangsa, melainkan kepada seluruh umat manusia. Meskipun ajaran Islam bersifat universal, pemahaman keislaman masing-masing umat memiliki keragaman. Setidaknya terdapat dua pendapat dalam Islam, yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ adalah final sehingga harus diikuti tanpa adanya modifikasi. Sedangkan pendapat selanjutnya yaitu ajaran universalitas Islam tidak terbatas dengan waktu dan tempat, sehingga dapat memasuki kebudayaan manapun.

Pendapat pertama muncul berlandaskan dalil al-Qur'an berikut:

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ...

Artinya: "...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukup-kan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu..."¹

Melalui ayat di atas, ajaran Islam telah sempurna, sehingga tidak perlu dilakukan penam-bahan ataupun inovasi dalam beragama. Tambahan atau inovasi tersebut disebut bidah oleh sebagian kalangan, karena tidak adanya ajaran atau indikasi dari Nabi tentang inovasi tersebut. Kebudayaan dapat berjalan selaras dengan Islam, tetapi apabila kebudayaan tersebut mem-pengaruhi dalam hal akidah, maka kebudayaan tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Pendapat pertama ini lebih sering disebut sebagai Islam Arab, yakni Islam dengan fundamentalisme Arab.

¹ Alquran 3: 3

Sedangkan pendapat kedua membantah hal tersebut. Menurut pendapat ini, ajaran Islam yang bersifat universal justru menjadi jalan bagi Islam dalam mengakomodir kebudayaan tanpa terbatas pada waktu dan tempat. Pendapat kedua ini yang dilakukan oleh konsep Islam Nusantara. Selain dikarenakan adanya pendapat pertama di atas, konsep Islam Nusantara menginginkan ajaran Islam dapat mempengaruhi seluruh kebudayaan yang telah ada.²

Islam Nusantara menjadi populer sejak 2015. Hal tersebut ditandai dengan tersebarnya video acara *isra' mi'raj* yang berlangsung di Istana Negara dengan pembacaan ayat al-Qur'an menggunakan nada langgam Jawa. Publik terbelah menjadi dua pihak, ada yang pro dan tentunya juga ada yang kontra. Dengan adanya pembacaan al-Qur'an menggunakan langgam Jawa tersebut, sekaligus mempopulerkan secara tidak langsung konsep Islam Nusantara tersebut. Konsep Islam Nusantara dianggap sebagai solusi terhadap budaya yang semakin ditinggalkan, sekaligus sebagai upaya advokasi terhadap kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kebudayaan merupakan suatu hal yang terdapat di setiap negara. Melalui hal tersebut, maka kebudayaan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui persoalan di atas, maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana konsep Islam Nusantara berdasarkan intelektual NU, kemudian apa konsekuensi dari Islam Nusantara serta mengapa konsep Islam Nusantara dapat menjadi konsep yang ideal dalam menyelaraskan antara Islam dan kebudayaan lokal.

Pribumisasi Islam: Suatu Konsep Awal

Pribumisasi Islam merupakan gagasan yang diutarakan pertama kali oleh mantan Presiden Republik Indonesia keempat yaitu Abdurrahman Wahid atau yang

² Khabibi Muhammad Lutfi, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal", *Shahih*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 2.

lebih akrab dipanggil dengan Gus Dur pada 1980-an. Konsep pribumisasi Islam diawali dengan gagasan Gus Dur pada saat itu yang menyarankan bahwa ucapan salam *al-salaamu 'alaykum* diganti menjadi ucapan selamat pagi, siang atau malam saja.

Usulan Gus Dur tersebut menimbulkan pro dan kontra, khususnya bagi para intelektual Muslim. Pribumisasi Islam merupakan suatu gagasan yang menjelaskan konsep Islam sebagai ajaran dari Tuhan agar dapat berdialog dalam kebudayaan manusia tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dengan adanya pribumisasi Islam maka Islam di Indonesia sudah tidak memerlukan konsep pemurnian Islam, karena menurutnya, konsep pemurnian Islam tidak lain merupakan upaya Arabisasi terhadap keislaman di Indonesia, sehingga secara tidak langsung akan menghilangkan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia.³

Pada konteks selanjutnya, akan tercipta pola keberagaman (Islam) sesuai dengan konteks lokalnya dalam wujud "Islam Pribumi" sebagai jawaban dari "Islam Autentik" atau "Islam Purifikatif" yang ingin melakukan proyek arabisme di dalam setiap komunitas Islam di seluruh dunia. Islam Pribumi justru memberi keanekaragaman interpretasi dalam praktik kehidupan beragama di masing-masing wilayah sesuai dengan kebudayaan mereka. Dengan demikian, Islam tidak lagi dipandang secara tunggal, melainkan beraneka ragam. Tidak ada lagi anggapan Islam yang di Timur Tengah sebagai Islam yang murni dan paling benar, karena Islam sebagai agama mengalami historisitas yang terus berlanjut.

Islam Pribumi memiliki sifat kontekstual, yaitu Islam sebagai agama dipahami sebagai ajaran yang berdasarkan konteks zaman dan tempat. Sehingga perubahan waktu dan tempat tidak menyebabkan Islam kehilangan esensinya, melainkan melalui perubahan tersebut Islam dapat selaras sesuai dengan waktu

³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001), hlm. 111.

dan tempat Islam tersebut hadir. Selain itu, Islam Nusantara juga memiliki sifat progresif, yakni kemajuan zaman dipahami bukan sebagai ancaman terhadap penyimpangan ajaran Islam, melainkan sebagai pemicu untuk melakukan respon terhadap kemajuan zaman tersebut. Islam pribumi juga memiliki karakter liberatif, yaitu Islam menjadi suatu agama yang dapat menjawab berbagai permasalahan kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan budaya. Sehingga konsep pribumisasi Islam merupakan gagasan keislaman yang tidak kaku, tekstual, melainkan dapat berinteraksi dengan kebudayaan sehingga mampu dalam menghadapi realitas sosial di masyarakat.⁴

Dalam konteks masyarakat Jawa, dengan kondisi masyarakat Jawa pada saat tersebut yang “menganut” animisme dan dinamisme, selain juga setelah kedatangan berbagai agama lainnya seperti Hindu, Budha dan Kristen, konsep pribumisasi Islam telah dilakukan oleh para pembawa ajaran Islam dalam menyebarkan ajaran keislaman menjadikan proses dakwah dilakukan dengan jalur damai dan penuh kearifan. Meskipun Ricklefs menolak pendapat tersebut, tetapi konsep pribumisasi Islam dapat dikatakan sebagai konsep ajaran Islam yang tidak hanya berfokus pada ranah normatif saja, melainkan juga pada ranah kultural.

Ahmad Zainul Hamdi, seorang dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan, bahwa konsep pribumisasi Islam bukanlah upaya untuk menjadikan Islam sebagai ajaran yang bersinkretis terhadap kebudayaan lokal, melainkan sebagai hasil kompromi antara kebudayaan dan ajaran keislaman. Pribumisasi Islam berangkat dari kedua latar belakang Islam, yaitu sosiologis dan epistemologis. Aspek sosiologis yaitu Islam yang “bersahabat” dengan kebudayaan lokal. Apabila masing-masing kebudayaan saling bertemu, yang terjadi cenderung adanya pertentangan antara masing-masing budaya, maka pribumisasi Islam berusaha

⁴ Ainul Fitriah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam”, *Teosofi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2013, hlm. 44.

mengkompromikan antara kebudayaan lokal dengan ajaran Islam. Konsep tauhid yang menjadi dasar Islam, didialogkan dengan “makna” suatu budaya, maka terjadilah pribumisasi Islam.⁵

Sedangkan dari latar epistemologis, konsep pribumisasi Islam berangkat dari adanya gerakan purifikasi Islam yang mulai masif. Purifikasi Islam dapat dilihat dari sejarahnya berawal dari abad ke-18. Purifikasi Islam merupakan upaya pemurnian agama karena ajaran Islam yang telah ada dianggap telah tercampur oleh bidah. Gerakan purifikasi Islam tidak bisa terlepas dari beberapa tokoh di antaranya seperti ibn Taymiyyah, yang pemikirannya mempengaruhi Muhammad ibn ‘abd al-Wahhab. Kemudian tokoh seperti Syah Waliyullah al-Dahwali di India, Muhammad ibn Ali al-Sanusi di Afrika Utara dan lainnya.

Gerakan tersebut meskipun tidak terorganisir secara rigid dalam suatu organisasi, tetapi bertujuan selain berupaya untuk memurnikan Islam tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Barat melalui penyebaran Injil (*gold, glory, gospel* atau bisa disebut sebagai *mercenary, missionary, military*). Gerakan purifikasi Islam tersebut sampai ke Indonesia melalui berbagai tokoh dan organisasi seperti KH. Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah di Kauman Yogyakarta pada 1912, Syekh Ahmad Syurkati yang mendirikan al-Irsyad pada 1914, kemudian KH. Zamzam yang merupakan ulama dari Padang mendirikan Persatuan Islam (Persis) pada 1923 dan sebagainya.⁶

Ahmad Zainul Hamdi menambahkan, dengan adanya gerakan purifikasi Islam tersebut maka konsep pribumisasi Islam sebagai bentuk advokasi terhadap kebudayaan lokal masyarakat Indonesia. Konsep Islam yang terdiri dari sisi normatif dan juga praktek turut menjadikan pribumisasi Islam merupakan suatu cara untuk membumikan Islam. Sisi Islam yang normatif tidak langsung menghapus budaya,

⁵ Ahmad Zainul Hamdi, *Wawancara*, Surabaya, 21 Januari 2021.

⁶ M. Arfan Mua’ammam, “Pesantren dan Islam Puritan: Pelembagaan Tajdid Keagamaan di Lembaga Pendidikan Islam”, *Tsaqafah*, Vol. 11, No. 2, November 2015, hlm. 275.

melainkan sisi normatif tersebut bagaimana bisa dipraktekkan kepada masyarakat suatu wilayah tertentu. Hamdi menganalogikan konsep normatif dan praktek Islam dengan konsep ijihad *qawl jadid* dan *qawl qadim*.⁷

Secara garis besar, *qawl jadid* dan *qawl qadim* merupakan bentuk ijihad Imam Syafi'i dalam menentukan hukum. *Qawl* yang berarti perkataan, pendapat atau pandangan, sedangkan *qadim* berarti masa lalu atau masa sebelumnya dan *jadid* yang berarti baru. Secara makna maka *qawl qadim* merupakan pandangan Imam Syafii sebelumnya atau masa lalu, sedangkan *qawl jadid* berarti pandangan Imam Syafii yang baru. Pada pandangan Imam Syafii tentang *qawl qadim* menunjukkan pandangan beliau pada saat tinggal di Irak, sedangkan *qawl jadid* merupakan pendapat beliau saat tinggal di Mesir. Konsep *qawl jadid* dan *qawl qadim* merupakan bentuk pembaharuan pendapat Imam Syafii terhadap suatu hukum berdasarkan faktor tertentu. Terdapat faktor geografis, kebudayaan dan adat istiadat, serta faktor ilmu pengetahuan dalam melatarbelakangi adanya konsep *qawl jadid* dan *qawl qadim* oleh Imam Syafii.⁸

Islam Nusantara

Setelah pribumisasi Islam yang digagas oleh Gus Dur, maka konsep pribumisasi Islam menjadi salah satu cara dalam mengakomodir kebudayaan lokal tanpa harus kehilangan sisi ketauhidan Islam. Seiring berjalannya waktu, konsep pribumisasi Islam dirasa penting untuk diperbaharui melalui konsepsi baru, maka muncullah gagasan Islam Nusantara. Islam Nusantara secara tidak langsung lahir berdasarkan konsep pribumisasi Islam yang digagas oleh Gus Dur sebagai bentuk *rebranding* dalam memperkuat soliditas terhadap siapapun yang berupaya untuk mengakomodir kebudayaan lokal tanpa harus kehilangan sisi Islam.

⁷ Ahmad Zainul Hamdi, *Wawancara*, Surabaya, 21 Januari 2021.

⁸ Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafii: Telaah Faktor Sosiologisnya", *Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015, hlm. 121-127.

Islam Nusantara berasal dari dua kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata *'salima'* yang berarti selamat, damai dan sejahtera, lalu muncul kata *'salam'* dan *'salamah'*. Dari *'salima'* muncul kata *'aslama'* yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Kata *'aslama'* juga berarti menyerah, tunduk, atau patuh. Dari kata *'salima'* juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di antaranya adalah kata *'salam'* dan *'salamah'* artinya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan penghormatan, *'taslim'* artinya penyerahan, penerimaan, dan pengakuan, *'silm'* artinya yang berdamai, damai, *'salam'* artinya kedamaian, ketenteraman, dan hormat, *'sullam'* artinya tangga, *'istislam'* artinya ketundukan, penyerahan diri, serta *'muslim'* dan *'muslimah'* artinya orang yang beragama Islam laki-laki atau perempuan.⁹

Sedangkan Nusantara merupakan penggabungan dari kedua kata, *nusa* dan *antara* yang bermakna pulau lain. Istilah Nusantara digunakan pada periode keemasan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi. Meskipun secara sejarah istilah Nusantara digunakan sebagai penyebutan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, mulai Sumatra yang termasuk Melayu, Jambi, Palembang dan sebagainya, kemudian wilayah Kalimantan, Jawa, hingga Onin di Irian¹⁰, tetapi pada konteks ini

Dengan demikian Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah *subha>nahu wa ta'a>la*. kepada para nabi dan rasul kepada umat manusia untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan serta perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Islam merupakan satu-satunya agama yang

⁹ A.W Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 654.

¹⁰ Weishaguna, "Reposisi Istilah Review Sejarah Ruang Kepulauan", *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, Vol. 6, No. 2, 2006.

diturunkan oleh Allah *subha>nahu wa ta'a>la* kepada manusia melalui para nabi dan rasul-Nya mulai dari Nabi Adam *'alayh al-sala>m* hingga Nabi Muhammad ﷺ.¹¹

Dalam ajaran Islam terdapat lima ajaran pokok, yaitu Islam merupakan agama yang mewajibkan penganutnya untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad ﷺ adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Kelima ajaran pokok tersebut disebut sebagai rukun Islam.¹² Selain itu, Islam juga memiliki dua landasan hukum yang selalu menjadi rujukan, yaitu Alquran dan Hadis Nabi. Keduanya saling berkesinambungan dan tidak saling bertentangan.

Nusantara merupakan istilah yang menjelaskan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Kata Nusantara berasal dari manuskrip konsep Negara Majapahit berbahasa Jawa yang ditulis pada sekitar abad ke-12 hingga abad ke-16. Sementara dalam literatur berbahasa Inggris abad ke-19, Nusantara merujuk pada kepulauan Melayu. Ki Hajar Dewantoro, memakai istilah Nusantara pada abad 20-an sebagai salah satu rekomendasi untuk nama suatu wilayah Hindia Belanda. Karena kepulauan tersebut mayoritas berada di wilayah negara Indonesia, maka Nusantara dapat diartikan dengan Indonesia. Istilah ini, di Indonesia secara konstitusional juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) MPR No.IV/MPR/1973, tentang Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E. Kata Nusantara ditambah dengan kata wawasan.¹³

Secara garis besar, Islam Nusantara memiliki makna bahwa ajaran Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang dipraktekkan oleh

¹¹ Marzuki, "Konsep Agama Islam", dalam Buku Pendidikan Agama Islam, diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dr.%20Marzuki%2C%20M.Ag./Dr.%20Marzuki%2C%20M.Ag.%20%20Buku%20PAI%20UNY%20-%20BAB%203.%20Konsep%20Agama%20Islam.pdf>, pada 20 Desember 2020, hlm. 38.

¹² HR. Bukhari No. 8, Muslim No. 16.

¹³ Khabibi Muhammad Lutfi, "Islam Nusantara ...", hlm. 3.

masyarakat Indonesia. Tetapi makna Islam Nusantara tidak hanya demikian. Pengertian Islam Nusantara memiliki konsep yang kompleks ketika merujuk berdasarkan pendapat berbagai organisasi Islam di Indonesia.

Konsep Islam Nusantara tidak bisa dilepaskan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). NU secara terbuka “mempromosikan” konsep Islam Nusantara melalui berbagai Musyawarah Nasional (Munas), seminar dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Awal tonggak berkembangnya pandangan Islam Nusantara adalah sejak pembacaan ayat Alquran menggunakan langgam Jawa pada acara *isra’ mi’raj* di Istana Negara pada 2015. Tak ayal, pembacaan ayat Alquran menggunakan langgam Jawa menimbulkan pro dan kontra masyarakat, khususnya umat Islam. Pembacaan ayat Alquran yang dimaksud yaitu surat al-Najm ayat 1-15 yang dilakukan oleh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Yasser Arafat. Acara *isra’ mi’raj* dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Irian dan berbagai pejabat negara dan sejumlah duta negara Timur Tengah.¹⁴

Sejak peristiwa tersebut, NU sering mempromosikan konsep Islam Nusantara. Yang terbaru yaitu pada Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 di Pesantren Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. Konsep Islam Nusantara dapat dilihat dari perspektif Pribumisasi Islam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ini penting karena Islam Nusantara bisa dibaca melalui konsep pribumisasi Islam yang dicetuskan oleh Gus Dur sebagai metode atau cara yang digunakan untuk membaca keislaman melalui “kacamata” kebudayaan, fiqih dan adat, aplikasi nash, tasawuf, hingga seni.¹⁵

¹⁴ Redaksi, “Al-Quran Dilantunkan dengan Langgam Jawa Tuai Kontroversi”, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20150518/15/434121/al-quran-dilantunkan-dengan-langgam-jawa-tuai-kontroversi>, pada 20 Desember 2020.

¹⁵ Fathoni Ahmad, “Munas NU Menjawab Para Penentang Islam Nusantara”, diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/103178/kala-munas-nu-matangkan-konsep-islam-nusantara>, pada 21 Desember 2020.

Nadirsyah Hosen atau yang akrab disapa Gus Nadir menjelaskan konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara dimunculkan di tengah meluasnya gerakan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Sebagaimana diketahui, ISIS memiliki klaim Islam yang murni, keras dan barbar. Gus Nadir mengkhawatirkan ideologi semacam ISIS tersebut akan masuk pula ke tanah air. Maka harus terdapat penegasan kembali terhadap corak Islam di Indonesia yang selama ini telah terbukti menebarkan kedamaian di tanah air selama berabad-abad, berbeda dengan konsep Islam milik ISIS.¹⁶

Adanya Islam Nusantara juga sebagai *counter* terhadap gerakan Islam transnasional yang hingga saat ini masih gencar terjadi. Sebut saja seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir¹⁷, Salafisme (atau Wahabisme) dan sebagainya. Gus Nadir juga menambahkan, Islam Nusantara juga sebagai *trademark* yang dimiliki oleh Indonesia. Arab Saudi dengan dua tanah suci yaitu Makkah dan Madinah, Turki juga merasa mewakili dunia Islam dikarenakan Turki merupakan tempat kekhalfahan terakhir umat Islam, Mesir dengan Universitas al-Azharnya dan sebagainya. Maka dengan adanya Islam Nusantara, Indonesia memiliki konsep yang siap mengglobal.

Selain dikarenakan adanya tekanan gerakan Islam transnasional, Islam Nusantara lahir juga dikarenakan mempromosikan budaya lokal agar dapat tetap bertahan di tengah arus globalisasi. Dalam wawancaranya dengan detik.com, Gus Nadir menjelaskan Islam Nusantara sebagai konsep Islam yang mempromosikan budaya lokal. Jadi dimanapun Islam berada, maka dia bisa berinteraksi dengan budaya setempat. Jadi misalnya akan ada Islam Australia, atau Islam Eropa, atau

¹⁶ Nadirsyah Hosen, "Islam Nusantara: Islam Lokal yang Menuju Islam Global?", diakses dari <https://nadirhosen.net/kehidupan/ummat/islam-nusantara-islam-lokal-menuju-islam-global/>, pada 19 Desember 2020.

¹⁷ Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada 19 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014.

Islam Amerika. Jadi ditekankan adalah metode bahwa Islam itu bisa berinteraksi dengan budaya lokal.¹⁸

Dengan mengakomodir kebudayaan lokal, tidak menjadikan konsep Islam Nusantara menyimpang dari ajaran pokok Islam. Melainkan Islam Nusantara berupaya dalam menjaga kebudayaan lokal Nusantara agar dapat selaras dengan ajaran Islam. Kebudayaan yang merupakan bagian dari agama, sehingga pada awal penyebaran Islam di Nusantara dapat diterima dengan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa pada waktu itu, dikarenakan masyarakat Jawa pada waktu itu mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemurnian ajaran Islam sendiri.

Melalui konsep Islam Nusantara, maka menghasilkan akulturasi budaya dan agama ini yang kemudian melahirkan produk Islam yang membumi dengan masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk akulturasi budaya dengan agama Islam di antaranya seperti upacara *Sekaten* pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad ﷺ, bentuk menara Masjid Kudus dan Masjid Banten, pertunjukan wayang kulit dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa Islam Nusantara merupakan upaya mengadaptasi nilai-nilai lokal ciri khas masyarakat Nusantara, baik dari segi budaya, adat dan tradisi. Sehingga konsep Islam Nusantara dapat menjadi pembeda dengan Islam Arab.¹⁹

Dalam konsep Islam Nusantara, terdapat beberapa spirit positif, yaitu sikap toleransi terhadap keanekaragaman. Dengan berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, menjadikan konsep Islam Nusantara mempermudah dalam melakukan *ijtihad* dalam menyebarkan ajaran Islam di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu

¹⁸ Redaksi, "Nadirsyah Hosen: Visi Islam Nusantara Bisa Disebarkan Secara Global", diakses dari <https://news.detik.com/abc-australia/d-3191394/nadirsyah-hosen-visi-islam-nusantara-bisa-disebarkan-secara-global>, pada 19 Desember 2020.

¹⁹ Ali Mursyid Azisi, "Islam Nusantara: Corak Keislaman Indonesia dan Perannya dalam Menghadapi Kelompok Puritan", *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 29, No. 2, Juli 2020. hlm. 124.

apresiasi terhadap tradisi yang baik. Tradisi yang baik tidak dimusuhi, namun justru menjadi sarana vitalisasi nilai Islam, dikarenakan nilai Islam perlu diterangkan yang akrab dengan pemeluknya. Islam Nusantara juga memiliki spirit tidak kaku dalam membaca teks keagamaan. Teks keagamaan setiap umat Islam adalah sama, yaitu Alquran dan Hadis. Pembacaan kedua teks keagamaan tersebut tentunya memiliki perbedaan dan perkembangan dengan seiringnya waktu. Pembacaan teks pada abad ke-7 Hijriah dengan abad ke-10 Hijriah dan dengan abad ke-14 Hijriah mengalami perbedaan dan perkembangan.²⁰ Melalui ketiga spirit tersebut, menjadikan konsep Islam Nusantara, mengutip Puji Astuti yang dikutip oleh Ali Mursyid Azizi sebagai konsep Islam yang berdasarkan moderasi (*wasatfiyah*), keseimbangan (*tawazun*) dan bertoleransi (*tasamuh*).²¹

Islam Nusantara sebagai Identitas

Tidak dapat dipungkiri, bahwa konsep Islam Nusantara menjadi suatu identitas tertentu suatu kelompok. NU yang menjadi pengagas konsep dan istilah Islam Nusantara memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Indonesia. Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden sebelumnya pernah menjadi Rais 'Am NU, Yaqut Cholil Coumas yang juga merupakan ketua Ansor—organisasi kepemudaan NU yang bertujuan untuk menjaga dan memperjuangkan ajaran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (Aswaja)—kini menjabat sebagai Menteri Agama, Mahfud MD yang menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam), meskipun Mahfud MD dianggap bukan sebagai anggota NU karena tidak memiliki kartu anggota NU (kartanu). Sebelumnya juga terdapat nama seperti Lukman Hakim Syaifuddin sebagai Menteri Agama dan lainnya.

Dengan posisi yang diterima oleh NU, baik melalui organisasi maupun melalui partai politik yang berafiliasi ke NU, seperti PKB dan PPP, maka secara tidak

²⁰ Alma'arif, "Islam Nusantara: Suatu Epistemologis dan Kritis", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, hlm. 284.

²¹ Ali Mursyid Azizi, "Islam Nusantara ...", hlm. 124.

langsung NU dapat dengan mudah mempromosikan konsep Islam Nusantara kepada publik. Gagasan sebagai Islam yang bersifat moderat, ramah terhadap kebudayaan lokal dan sebagai bentuk kontra narasi terhadap “Islam Arab” menjadi konsep yang ditawarkan oleh NU sebagai bentuk ideal keislaman di Indonesia.

Presiden Indonesia Joko Widodo bahkan mengapresiasi lahirnya Islam Nusantara. Joko Widodo menggunakan Islam Nusantara sebagai pilar konseptual, baik secara domestik dan internasional. Dirinya mempromosikan Islam Nusantara dalam forum global dalam upaya moderasi Islam dan menangkal radikalisme. Badan anti terorisme dan Kementerian Luar Negeri juga memasukkan aspek Islam Nusantara dalam program dan pesan mereka dalam upaya deradikalisasi.²²

Melalui posisi politik yang strategis tersebut tak ayal menyebabkan dugaan bahwa Islam Nusantara sebagai suatu gerakan politik, daripada sebagai sebuah konsep baru keislaman. Hal berbeda dikemukakan oleh Ahmad Zainul Hamdi. Menurutnya, Islam Nusantara bukanlah identitas politik suatu kelompok, Hamdi mengibaratkan seperti Muhammadiyah yang memiliki konsep Islam berkemajuan. Menurutnya, suatu identitas kelompok itu penting sebagai bentuk upaya soliditas suatu kelompok, selain sebagai bentuk *rebranding* dari konsep pribumisasi Islam.²³ Meskipun tidak semua anggota NU sebagai “pelopor” mengamini konsep tersebut, tetapi Islam Nusantara merupakan suatu identitas NU sebagai bentuk kontra narasi terhadap purifikasi Islam, Arabisasi dan advokasi terhadap kebudayaan lokal.

Islam Nusantara sebagai Advokasi Kebudayaan Lokal

Advokasi memiliki asal kata dari bahasa Belanda yaitu *advocaat* atau *advocateur* yang berarti pengacara atau pembela. Dalam bahasa Inggris, advokasi disebut dengan *advocate, to advocate*, yang tidak hanya berarti *to defend*

²² Greg Fealy, “NU dan Jebakan Politik: Masa Depan, Kedekatan dengan Jokowi dan PKB”, diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/analisis-nu-dan-jebakan-politik-masa-depan-kedekatan-dengan-jokowi-dan-pkb/>, pada 15 Januari 2021.

²³ Ahmad Zainul Hamdi, *Wawancara*, Surabaya, 21 Januari 2021.

(membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan).²⁴

Melakukan advokasi terhadap suatu permasalahan berarti bertindak sebagai penengah, perantara serta pembela yang akan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau pihak-pihak yang terkait. Advokasi dilakukan dalam membantu pemecahan masalah ataupun pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dengan cara melakukan kontak dan berbagai pendekatan dengan pihak-pihak instansi pemerintah dalam semua tindakan.²⁵

Dalam membangun konsep advokasi di luar batas pengertian advokasi sebagai proses litigasi dan perubahan kebijakan, terdapat dua unsur penting. Menurut Makinuddin dan Sasongko yang dikutip oleh Teuku Zulyadi, pertama, advokasi harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus negara, tujuan yang seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (*social transformation*). Kedua, advokasi harus dapat dijadikan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orientasi, strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Dua unsur itu yang belum ada dalam konsep advokasi sebagai alat untuk mengubah kebijakan maupun advokasi sebagai proses pembelaan di pengadilan.²⁶

Dengan tujuannya yang melakukan perubahan, maka terdapat prinsip-prinsip advokasi. Menurut Edi Suharto terdapat beberapa prinsip yang bisa

²⁴ Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 63.

²⁵ Widya Darmawan, dkk, "Advokasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, April 2019 hlm 101.

²⁶ Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial ...", hlm. 65.

dijadikan pedoman dalam merancang advokasi, yaitu realistis, sistematis, taktis, strategis dan berani.²⁷

Realistis, yaitu advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur (*measurable*). Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi berbagai pilihan dan membuat keputusan prioritas. Pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai (*achievable*) dalam kurun waktu tertentu (*time-bound*). Jangan membuang energi dan waktu dengan pilihan yang tidak mungkin dicapai. Gagas keberhasilan kecil namun konsisten. Sekecil apapun, keberhasilan senantiasa akan memberikan motivasi.

Sistematis, yaitu advokasi merupakan suatu seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat. "*If we fail to plan, we plan to fail*," merupakan suatu prinsip yang harus dipegang dalam melakukan advokasi. Lakukan pengemasan informasi semenarik mungkin, serta libatkan media secara efektif. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

Taktis, yaitu para pegiat advokasi harus membangun koalisi dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan tujuan dan saling percaya (*trust*). Sekutu terdiri dari sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu dekat dinamakan dengan lingkaran inti, yakni sekumpulan orang atau organisasi 'yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sedangkan sekutu jauh merupakan berbagai pihak lain yang mendukung kita,

²⁷ Widya Darmawan, dkk, "Advokasi Sosial terhadap Anak ...", hlm 102 dan Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial ...", hlm. 71.

namun tidak terlibat dalam gerakan advokasi secara langsung. Lingkaran inti biasanya disatukan atau bersatu atas dasar kesamaan visi dan ideologis. Organisasi lingkaran inti dibagi tiga berdasarkan fungsinya, yaitu:

- a. Divisi kerja garis depan (*frontline unit*) yang melaksanakan fungsi juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi dan menggalang sekutu.
- b. Divisi kerja pendukung (*supporting unit*) yang menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data dan akses
- c. Divisi kerja basis (*ground atau underground work unit*) yang merupakan dapur gerakan advokasi: membangun basis massa, pendidikan politik kader, memobilisasi aksi.

Dalam kaitannya dengan kebudayaan, advokasi kebudayaan bermakna pembelaan, mempromosikan serta membentuk suatu perubahan terhadap kebudayaan yang terdapat di suatu wilayah. Melalui konsep Islam Nusantara, secara tidak langsung NU telah melakukan advokasi kebudayaan di tengah arus globalisasi yang pesat.

Menurut Ahmad Syafii Ma'arif, sebagaimana dikutip oleh Alma'arif, melalui ajaran Islam, nilai universal seperti keadilan, persamaan, dan kemanusiaan, menempati porsi yang luas. Berpangkal pada nilai tersebut, Islam, khususnya di Indonesia, pada masa awal mampu bersimbiosis dengan budaya lokal yang sudah pasti mengedepankan prinsip yang sama. Titik temu ini selanjutnya dikemas dalam format dakwah yang tidak selalu mendudukkan masyarakat lokal sebagai tertuduh dan salah, akan tetapi mereka disadarkan dengan berangkat dari pengetahuan yang telah dimilikinya. Salah satu bentuk advokasi budaya yang penting adalah tradisi wayang, yang dikemas sedemikian rupa oleh para *wali songo*, sehingga mampu menjadikan ruang ideologisasi masyarakat setempat untuk masuk Islam.²⁸

²⁸ Alma'arif, "Islam Nusantara ...", hlm. 280-281.

Ahmad Zainul Hamdi juga menambahkan, bahwa Islam Nusantara sebagai suatu konsep keislaman yang berupaya tetap berislam tanpa perlu anti terhadap kebudayaan, bahkan mengakomodir kebudayaan lokal tersebut. Menurutnya, Islam Nusantara hadir sebagai jalan terhadap kebudayaan yang sudah umum di masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan Islam, tetapi tetap boleh dilakukan dengan ditambahkan unsur keislaman. Dengan melakukan akomodir terhadap kebudayaan, Islam sebagai ajaran normatif dapat dipraktekkan kepada seluruh masyarakat tanpa perlu menghapus kebudayaan di masyarakat tersebut. Karena apabila unsur tauhid Islam sudah terpenuhi, maka suatu kebudayaan sah-sah saja tetap dijalankan. Dengan adanya Islam Nusantara juga dapat membumikan Islam di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan ajaran normatif Islam tanpa harus takut akan menghilangkan budaya mereka.²⁹

Pro dan Kontra Islam Nusantara

Konsep Islam Nusantara memiliki tujuan yang mulia dalam mengadvokasi kebudayaan lokal suatu wilayah, dalam hal ini di Indonesia. Menurut Azhar Ibrahim dari Universiti Nasional Singapura, Islam Nusantara belum menelurkan gagasan filsafat yang rasional (belum menghasilkan keserjanaan Islam yang tinggi). Frasa ini baru muncul sebagai konsep, ketika akan diselenggarakannya muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur.³⁰

Kritik Islam Nusantara juga dilancarkan oleh Felix Siaw yang merupakan mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Siaw tidak setuju jika gerakan Islam Nusantara dibenturkan atau bahkan menjelek-jelekan Islam yang bermula dari tanah Arab. Menurutnya, konsep Islam Nusantara yang damai dan tenteram, sebenarnya dapat diterima. Namun, jika kelompok Islam Nusantara menuding bahwa Islam Arab sebagai sumber terjadinya peperangan ia tidak setuju. Tidak

²⁹ Ahmad Zainul Hamdi, *Wawancara*, Surabaya, 21 Januari 2021.

³⁰ Khabibi Muhammad Lutfi, "Islam Nusantara ...", hlm. 2.

hanya itu, menurutnya ide "Islam Nusantara" dipakai untuk membuat pembenaran terhadap penistaan agama, dengan dalih toleransi, keberagaman, dan pluralisme. Baginya konsep "Islam Nusantara" merupakan perwujudan tempat para liberalis yang sudah tak laku dengan ide "Islam Liberal" mereka.

Selain dari kedua tokoh di atas, tidak hanya kritik, bahkan penolakan terhadap Islam Nusantara juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat yang menulis surat resmi tertanggal 21 Juli 2018. Di antara alasan MUI Sumatra Barat menolak Islam Nusantara dikarenakan istilah Islam Nusantara dinilai mengundang perdebatan yang tak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Kedua, Istilah Islam Nusantara, membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam. Ketiga, Istilah Islam Nusantara dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Keempat, Istilah Islam Nusantara sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspek (toleran) versi Islam Nusantara saja, melainkan harus menyeluruh. Bagi MUI Sumatra Barat, nama 'Islam' telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun seperti "Nusantara" demikian kesimpulan MUI Sumbar sebagaimana dokumen unggahan akun Facebook Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, pada 23 Juli 2018.³¹

Tentunya selain terdapat sikap kontra terhadap konsep Islam Nusantara, juga terdapat berbagai pihak yang mendukung terhadap konsep Islam Nusantara. Melalui konsep Islam Nusantara, ajaran Islam diibaratkan sebagai air yang akan membersihkan dan menyucikan segala hal yang dilewatinya, meningkatkan derajat semua kebudayaan dan nilai lokal yang dipangkunya. Islam yang demikian

³¹ Ade Irfan Abdurrahman, "Pertarungan Wacana Islam Nusantara di Media Online", *DiMCC Conference Proceeding*, Vol. 1, 2018, hlm. 192-193.

merupakan Islam yang berporos pada tradisi, sebagaimana konsep dakwah para wali yang telah menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan budaya.

Melalui pendekatan budaya, Islam Nusantara dapat mewakili nilai Islam yang toleran terhadap agama lain. Selain itu, sikap ramah terhadap budaya lokal, kompatibel dengan zaman, negara dan bangsa, serta mau berbagi bersama dalam bekerjasama dengan agama dan penganut kepercayaan lain dalam membangun Indonesia.³²

Dalam perkembangannya pula, ajaran Islam selalu bertemu dengan beragam kebudayaan yang memungkinkan Islam menjadi dinamis. Menurut Darori Amin, kedinamisan Islam ditunjukkan dengan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Akulturasi tersebut berbeda dengan sinkretisme agama yang saling mencampurkan berbagai elemen yang saling bertentangan, sehingga menurut Beatty, seringkali memunculkan tipe baru yang secara substansial tetapi juga disertai dengan hilangnya sebagian identitas elemen tersebut. Beatty menambahkan, bahwa dalam bentuk akulturasi antara Islam dengan kebudayaan, di sini Beatty memberikan contoh kebudayaan Jawa, hal yang terjadi adalah sesuatu yang berpadu di dalamnya, sehingga konsep sinkretisasi tidak berlaku.³³

Penutup

Islam Nusantara merupakan perpaduan dari ajaran Islam yang bersifat universal dengan tidak melupakan dan berupaya mengadvokasi kebudayaan lokal. Meskipun memiliki nama "Islam Nusantara", konsep ini tidak hanya terbatas pada pembelaan kebudayaan di Indonesia, tetapi mengutip Gus Nadir, bahwa konsep Islam Nusantara dapat diaplikasikan di berbagai wilayah dan juga negara lainnya.

³² Nur Khalik Ridwan, Abdur Rozaki, dkk., *Gerakan Kultural Islam Nusantara*, ed. Jibril FM, Abdul Muiz Fansuri dkk. (Yogyakarta: Jamaah Nahdliyyin Matraman (JNM) dan Panitia Mukhtamar NU ke-33, 2015), hlm. 14.

³³ Nur Khalik Ridwan, Abdur Rozaki, dkk., *Gerakan Kultural Islam ...*, hlm. 19.

Muhammad Eko Anang, Islam Nusantara: Advokasi Budaya Dalam Upaya Keselarasan Antara Keislaman Dan Kebudayaan Di Indonesia

Apabila Islam “dibawa” di Australia, maka akan muncul Islam Australia, apabila “dibawa” ke Eropa, maka akan muncul Islam Eropa dan sebagainya.

Tentunya konsep advokasi terhadap kebudayaan lokal mendapatkan pro dan kontra. Di satu sisi, advokasi terhadap kebudayaan diperlukan untuk menjaga kelestarian kebudayaan lokal di suatu wilayah. Tetapi di sisi lain, advokasi terhadap kebudayaan bagi sebagian pihak akan mendegradasi nilai ajaran keislaman. Beberapa pihak menyebutkan bahwa konsep Islam Nusantara bukanlah suatu konsep yang matang. Selain itu juga beranggapan bahwa konsep Islam Nusantara justru menimbulkan bidah baru dalam Islam serta menimbulkan kebencian terhadap sesama umat Islam dikarenakan perdebatan yang tidak seharusnya dilakukan.

Sehingga konsep Islam Nusantara ini merupakan konsep yang memiliki tujuan mulia, yaitu melestarikan kebudayaan lokal di Indonesia. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, hendaknya konsep Islam Nusantara tidak hanya mengedepankan advokasi terhadap kebudayaan lokal saja, melainkan “memilah” kebudayaan yang dapat selaras dengan ajaran Islam. Perlu diketahui, bahwa tidak setiap kebudayaan dapat mendegradasi nilai keislaman, seperti halnya dalam berpakaian, bentuk bangunan masjid dan sebagainya. Tetapi dalam berbagai kebudayaan, hendaknya konsep Islam Nusantara juga selektif dalam “memilah” kebudayaan yang dapat selaras dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Ade Irfan, “Pertarungan Wacana Islam Nusantara di Media Online”, *DiMCC Conference Proceeding*, Vol. 1, 2018.
- Alma’arif, “Islam Nusantara: Suatu Epistemologis dan Kritis”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015.
- Azisi, Ali Mursyid, “Islam Nusantara: Corak Keislaman Indonesia dan Perannya dalam Menghadapi Kelompok Puritan”, *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 29, No. 2, Juli 2020.

Muhammad Eko Anang, Islam Nusantara: Advokasi Budaya Dalam Upaya Keselarasan Antara Keislaman Dan Kebudayaan Di Indonesia

- Darmawan, Widya dkk, "Advokasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, April 2019.
- Fitriah, Ainul, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam", *Teosofi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2013.
- HR. Bukhari dan Muslim.
- Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafii: Telaah Faktor Sosiologisnya", *Al-Mizan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015.
- Lutfi, Khabibi Muhammad, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal", *Shahih*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Mua'amar, M. Arfan, "Pesantren dan Islam Puritan: Pelembagaan Tajdid Keagamaan di Lembaga Pendidikan Islam", *Tsaqafah*, Vol. 11, No. 2, November 2015.
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ridwan, Nur Khalik Abdur Rozaki, dkk., *Gerakan Kultural Islam Nusantara*, ed. Jibril FM, Abdul Muiz Fansuri dkk, Yogyakarta: Jamaah Nahdliyin Matraman (JNM) dan Panitia Mukhtar NU ke-33, 2015.
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.
- Weishaguna, "Reposisi Istilah Review Sejarah Ruang Kepulauan", *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, Vol. 6, No. 2, 2006.
- Zulyadi, Teuku, "Advokasi Sosial", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 2, 2014.

Wawancara

Ahmad Zainul Hamdi, *Wawancara*, Surabaya, 21 Januari 2021.

Internet

- Redaksi, "Al-Quran Dilantunkan dengan Langgam Jawa Tuai Kontroversi", diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20150518/15/434121/al-quran-dilantunkan-dengan-langgam-jawa-tuai-kontroversi>, pada 12 Februari 2023.
- Redaksi, "Nadirsyah Hosen: Visi Islam Nusantara Bisa Disebarkan Secara Global", diakses dari <https://news.detik.com/abc-australia/d-3191394/nadirsyah-hosen-visi-islam-nusantara-bisa-disebarkan-secara-global>, pada 12 Februari 2023.
- Marzuki, "Konsep Agama Islam", dalam Buku Pendidikan Agama Islam, diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Dr.%20Marzuki%2C%20M.Ag./Dr.%20Marzuki%2C%20M.Ag.%20%20Buku%20PAI%20UNY%20-%20BAB%203.%20Konsep%20Agama%20Islam.pdf>, pada 20 Februari 2023.
- Ahmad, Fathoni, "Munas NU Menjawab Para Penentang Islam Nusantara", diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/103178/kala-munas-nu-matangkan-konsep-islam-nusantara>, pada 21 Februari 2023.

Muhammad Eko Anang, Islam Nusantara: Advokasi Budaya Dalam Upaya Keselarasan Antara Keislaman Dan Kebudayaan Di Indonesia

Fealy, Greg, "NU dan Jebakan Politik: Masa Depan, Kedekatan dengan Jokowi dan PKB", diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/analisis-nu-dan-jebakan-politik-masa-depan-kedekatan-dengan-jokowi-dan-pkb/>, pada 21 Februari 2023.

Hosen, Nadirsyah, "Islam Nusantara: Islam Lokal yang Menuju Islam Global?", diakses dari <https://nadirhosen.net/kehidupan/ummat/islam-nusantara-islam-lokal-menuju-islam-global/>, pada 21 Februari 2023.